

FRAMING MEDIA ONLINE TERHADAP KESALAHAN SIMBOL GARUDA PANCASILA OLEH BRIN PADA HARI LAHIR PANCASILA 2026

Fajar Nuril Mutaqin¹, Rizky Cahyadi², Pandu Haidar Sanjaya³, Ikhsan Ahmad⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3,4}

Email: fajarnm311205@gmail.com¹, rizky1cahyadi@gmail.com², panduhaidarsanjaya@gmail.com³,
ikhsan@untirta.ac.id⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze the framing of online media coverage regarding the misrepresentation of the Garuda Pancasila symbol by the National Research and Innovation Agency (BRIN) during the commemoration of Pancasila Day on June 1, 2026. The study employs a descriptive qualitative approach using Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's framing analysis model through four structures, namely syntax, script, thematic, and rhetorical. Data were collected through documentation techniques on Indonesian online news articles that explicitly discussed the incident, then analyzed to identify emerging framing patterns. The results reveal four main framing patterns. First, the media framed the incident as an institutional irony highlighting the contradiction between BRIN's status as a research institution and its failure to verify the most fundamental aspect. Second, the media packaged the event as a reflection of ethical issues in the adoption of artificial intelligence technology in the government sector, emphasizing the importance of manual curation and validation. Third, the media highlighted the legal and sacred dimensions of the national symbol by referring to Law Number 24 of 2009, making the error appear as a serious violation. Fourth, the media framed BRIN's response ambivalently, appreciating the swift apology while still demanding tangible systemic improvement. This study concludes that online media do not merely convey information but actively construct reality and perform a social control function that shapes public understanding of institutional responsibility, technological ethics, and respect for the symbol of national sovereignty.</i> Keyword: media framing, Garuda Pancasila, BRIN, Pancasila Day, framing analysis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis framing media online terhadap kesalahan penggambaran simbol Garuda Pancasila oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki melalui empat struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap artikel berita media online Indonesia yang membahas insiden tersebut secara eksplisit, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembingkai yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan empat pola framing utama. Pertama, media membingkai insiden sebagai ironi kelembagaan yang menyoroti kontradiksi antara status BRIN sebagai lembaga riset dengan kegagalannya memverifikasi hal paling mendasar. Kedua, media mengemas peristiwa sebagai cermin persoalan etika adopsi teknologi kecerdasan buatan di sektor pemerintahan yang menekankan pentingnya kurasi dan validasi manual. Ketiga, media menonjolkan dimensi legalitas dan sakralitas lambang negara dengan merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga kesalahan tersebut tampak sebagai pelanggaran serius. Keempat, media membingkai respons BRIN

secara ambivalen, yakni mengapresiasi langkah cepat permohonan maaf namun tetap menuntut perbaikan sistemik yang nyata. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa media online tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi secara aktif mengonstruksi realitas dan menjalankan fungsi kontrol sosial yang membentuk pemahaman publik tentang tanggung jawab institusional, etika teknologi, dan penghormatan terhadap simbol kedaulatan negara.

Kata Kunci : *framing media online, Garuda Pancasila, BRIN, Hari Lahir Pancasila, analisis framing*

A. PENDAHULUAN

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi pusat perhatian publik setelah unggahan resminya menuai kritik tajam. Akun resmi BRIN di platform X @brin_indonesia mengunggah poster peringatan yang menampilkan ilustrasi Garuda Pancasila yang diduga kuat dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Persoalannya bukan sekadar penggunaan teknologi tersebut, melainkan kekeliruan fatal pada detail anatomi lambang negara yang seharusnya tunduk pada pakem resmi. Warganet dengan cepat menemukan bahwa jumlah helai bulu pada sayap dan ekor Garuda tidak sesuai dengan ketentuan yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Kesalahan ini memicu gelombang reaksi yang tidak hanya menyoroti aspek visual, tetapi juga menyeret diskusi ke ranah etika teknologi, legalitas, dan kredibilitas lembaga riset negara.

Kronologi insiden ini bermula pada Senin pagi, 1 Juni 2026, ketika BRIN mengunggah konten peringatan Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan tangkapan layar yang beredar luas, gambar Garuda tersebut menunjukkan jumlah bulu yang tidak simetris dan tidak sesuai pakem, yakni sayap kanan 16 helai, sayap kiri 15 helai, dan ekor 7 helai, padahal seharusnya masing-masing sayap berjumlah 17 helai, ekor 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan leher 45 helai. Ketidaksesuaian ini bukan perkara estetika belaka, melainkan menyentuh filosofi kebangsaan yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Media online kemudian ramai memberitakan insiden ini dengan berbagai sudut pandang, mulai dari kritik pedas warganet hingga sorotan terhadap ironi sebuah lembaga riset yang justru gagal pada hal paling mendasar, yakni memverifikasi simbol kedaulatan negara sebelum dipublikasikan. (Asmaul Husna et al., 2024)

Salah satu dimensi yang paling menonjol dalam pemberitaan adalah ironi kelembagaan yang menempatkan BRIN pada posisi sulit. Sebagai lembaga yang memiliki mandat riset dan inovasi, BRIN semestinya menjadi garda terdepan dalam hal ketelitian, validasi data, dan standar akurasi. Namun, insiden ini justru memperlihatkan sebaliknya. Media Indonesia, misalnya, menyoroti bahwa netizen mempertanyakan mengapa lembaga riset berskala nasional bisa malas melakukan kroscek pada hal yang paling mendasar seperti lambang negara.

Narasi ini diperkuat oleh komentar-komentar di media sosial yang dengan cepat menjadi bahan pemberitaan, menciptakan efek amplifikasi yang membuat kritik publik terasa lebih masif dan terlegitimasi. Media tidak sekadar melaporkan fakta, tetapi secara aktif membingkai peristiwa sebagai cermin persoalan budaya kerja dan standar verifikasi di lingkungan institusi pemerintah. (Fuhat & Wahab, 2024)

Selain aspek ironi, media juga membingkai insiden ini sebagai momentum untuk menyoroti etika penggunaan AI di sektor pemerintahan. Beberapa pemberitaan secara eksplisit mengaitkan kesalahan tersebut dengan kecenderungan mengadopsi teknologi generatif tanpa kurasi dan validasi manual yang memadai. [Kompas.com](https://www.kompas.com), dalam artikel lanjutan, bahkan menghubungkan peristiwa ini dengan polemik yang lebih luas mengenai penggunaan AI di pemerintahan, termasuk kasus deepfake yang melibatkan pejabat negara. Framing ini tidak berhenti pada kesalahan spesifik pada gambar Garuda, tetapi berkembang menjadi kritik terhadap pola kerja serba instan yang mengorbankan presisi, terlebih ketika berhadapan dengan simbol-simbol kedaulatan yang memiliki nilai sakral dan konsekuensi hukum. Media menekankan bahwa AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti ketelitian manusia, terutama dalam konteks konten kenegaraan yang sensitif.

Dimensi legalitas juga menjadi pijakan penting dalam framing media. Beberapa pemberitaan mengutip langsung Pasal 57 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur larangan penggunaan lambang negara secara tidak sesuai, dengan ancaman pidana penjara hingga satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta. Framing hukum ini memberikan bobot serius pada peristiwa yang mungkin oleh sebagian pihak dianggap remeh, dengan mengaitkannya pada norma konstitusional dan identitas kebangsaan. Media tidak hanya memberitakan permohonan maaf BRIN, tetapi juga menempatkan kekeliruan tersebut dalam kerangka pelanggaran terhadap aturan yang mengikat secara hukum.

Pendekatan ini menciptakan tekanan publik yang lebih besar terhadap BRIN untuk tidak berhenti pada permintaan maaf, tetapi juga melakukan evaluasi internal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, framing media terhadap respons BRIN memperlihatkan sifat yang ambivalen. Di satu sisi, media mengapresiasi langkah cepat institusi tersebut dalam mengakui kesalahan, menarik konten bermasalah, dan menyampaikan permohonan maaf resmi pada Senin sore, 1 Juni 2026, melalui akun @brin_indonesia. BRIN menyatakan bahwa insiden ini menjadi pelajaran untuk lebih teliti dan berhati-hati, serta berkomitmen memperbaiki konten dan memperketat prosedur operasional standar. Namun, di sisi lain, apresiasi tersebut tidak sepenuhnya menutupi kritik. Media tetap menyoroti bahwa

permohonan maaf saja tidak memadai tanpa disertai perubahan struktural dalam proses produksi konten. Sejumlah pemberitaan menegaskan bahwa insiden ini semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi AI, terutama dalam konteks simbol-simbol kenegaraan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana media online mengonstruksi realitas melalui teks berita, bukan mengukur frekuensi atau menarik generalisasi statistik. Data yang dikumpulkan berbentuk kata, kalimat, dan gambaran visual dari artikel berita, bukan angka. Model Pan dan Kosicki dipilih karena perangkat analisisnya tergolong lengkap dan memungkinkan peneliti membedah teks berita secara terperinci melalui empat struktur besar, yaitu sintaksis yang mencakup cara wartawan menyusun fakta seperti headline, lead, latar, kutipan, dan penutup, skrip yang mencakup cara wartawan mengisahkan fakta melalui kelengkapan 5W+1H, tematik yang mencakup cara wartawan menulis fakta melalui detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti, serta retorik yang mencakup cara wartawan menekankan fakta melalui leksikon, grafis, dan metafora. Keempat struktur tersebut dijadikan kerangka untuk menggali bagaimana media online membingkai kesalahan simbol Garuda Pancasila oleh BRIN, mulai dari pemilihan judul hingga diksi yang dipakai untuk menonjolkan aspek tertentu dari peristiwa. (Juidah & Pratiwi, 2025)

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap artikel berita yang dimuat di media online Indonesia terkait insiden kesalahan penggambaran Garuda Pancasila oleh BRIN pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Pemilihan artikel dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria relevansi isu dan keterwakilan periode pemberitaan, yakni artikel yang secara eksplisit membahas insiden tersebut, memuat respons BRIN, serta menampilkan framing tertentu terhadap peristiwa. Setiap artikel dianalisis dengan menelusuri keempat struktur framing Pan dan Kosicki untuk mengidentifikasi pola pembingkai yang muncul, seperti penonjolan ironi kelembagaan, kritik terhadap adopsi AI tanpa validasi, penekanan aspek legalitas lambang negara, dan penggambaran respons institusi. Analisis dilakukan dengan membaca teks secara cermat, mencatat elemen framing pada setiap struktur, lalu membandingkan pola yang konsisten antarartikel untuk menarik kesimpulan mengenai kecenderungan framing media online dalam merespons peristiwa tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ironi Lembaga Riset Negara

Media online membingkai insiden ini sebagai ironi kelembagaan yang tajam dan berlapis. BRIN yang semestinya menjadi garda terdepan dalam ketelitian, validasi data, dan standar riset yang tinggi justru tersandung pada hal paling mendasar yakni memastikan kebenaran penggambaran Lambang Negara Garuda Pancasila. Kontradiksi ini menjadi titik tolak utama pemberitaan, di mana media secara konsisten menempatkan posisi BRIN sebagai lembaga riset negara berhadapan langsung dengan realitas kekeliruan yang seharusnya paling mudah dihindari. Dalam berbagai artikel, media menegaskan bahwa lembaga yang memiliki mandat riset dan inovasi seharusnya menerapkan prosedur verifikasi berlapis sebelum memublikasikan konten yang berkaitan dengan simbol negara. Media tidak sekadar melaporkan peristiwa, tetapi secara aktif mengonstruksi narasi bahwa kelalaian ini mencerminkan persoalan yang lebih dalam mengenai budaya kerja dan standar ketelitian di lingkungan institusi pemerintah. (Lin et al., 2024)

Narasi ironi ini diperkuat dengan kutipan-kutipan warganet yang menyoroti kelalaian tersebut sehingga menciptakan efek amplifikasi yang membuat kritik publik terasa lebih masif dan terlegitimasi. Media memilih dan menampilkan komentar-komentar paling tajam dari platform media sosial, mulai dari sindiran halus hingga kritik terbuka yang mempertanyakan kompetensi lembaga. Strategi ini bukan tanpa tujuan, karena dengan menampilkan suara publik secara menonjol, media membangun kesan bahwa kritik terhadap BRIN bukanlah pandangan minoritas melainkan gelombang opini yang luas. Efeknya, kritik publik terasa lebih sah dan mendapat pembenaran kolektif. Media juga menyoroti bahwa insiden ini terjadi pada momen yang sangat simbolik yakni Hari Lahir Pancasila, sehingga kekeliruan tersebut terasa lebih ironis dan menyakitkan bagi publik yang mengharapkan peringatan yang khidmat dan penuh ketelitian.

Framing ini menempatkan BRIN dalam posisi defensif yang sulit dipatahkan. Media secara berulang menegaskan bahwa lembaga riset seharusnya menjadi contoh dalam hal akurasi dan ketelitian, bukan sebaliknya menjadi pihak yang justru melakukan kesalahan mendasar. Beberapa pemberitaan bahkan membandingkan standar kerja BRIN dengan ekspektasi publik yang tinggi terhadap institusi yang menaungi para peneliti dan akademisi. Perbandingan ini menciptakan tekanan reputasi yang besar, karena publik menjadi mempertanyakan apakah standar ketelitian yang selama ini diklaim BRIN benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari. Media juga menyoroti pentingnya akurasi dalam

komunikasi publik lembaga pemerintah, terutama ketika konten yang dipublikasikan menyangkut simbol kedaulatan negara yang memiliki nilai konstitusional dan sakral.

Dampak dari framing ironi kelembagaan ini terlihat pada pergeseran fokus pemberitaan dari sekadar kesalahan teknis menjadi pertanyaan tentang kredibilitas institusi secara keseluruhan. Media tidak lagi hanya membahas jumlah bulu yang salah pada gambar Garuda, tetapi mengangkat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai bagaimana lembaga riset terbesar di Indonesia bisa gagal pada aspek paling elementer dari ketelitian. (Paramitha & Karim, 2022) Beberapa artikel menyoroti bahwa kesalahan ini bukan pertama kalinya institusi pemerintah tersandung dalam penggunaan simbol negara, sehingga menciptakan pola narasi yang lebih luas tentang lemahnya pengawasan internal dan prosedur verifikasi di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, framing ironi kelembagaan berfungsi sebagai cermin yang memantulkan persoalan tata kelola dan budaya kerja di lembaga publik, jauh melampaui peristiwa tunggal yang menjadi pemicunya.

Framing ironi kelembagaan ini menciptakan efek jangka panjang terhadap cara publik memandang BRIN dan institusi pemerintah lainnya. Media berhasil mengubah insiden kecil menjadi diskursus tentang standar kompetensi, akuntabilitas, dan integritas lembaga riset negara. Kritik yang semula berfokus pada gambar Garuda berkembang menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kredibilitas institusi yang gagal pada aspek paling dasar dari ketelitian. Media juga menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga riset sangat bergantung pada konsistensi antara klaim dan praktik, sehingga kesalahan seperti ini berpotensi merusak reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Dengan mengemas peristiwa ini sebagai ironi kelembagaan yang tajam, media tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga membentuk pemahaman publik tentang pentingnya ketelitian, validasi, dan tanggung jawab institusional dalam setiap konten yang dipublikasikan kepada masyarakat luas.

2. Etika Adopsi Teknologi AI

Media membingkai kesalahan ini sebagai cermin persoalan etika penggunaan kecerdasan buatan di sektor pemerintahan yang semakin mendesak untuk dibahas. Sejumlah pemberitaan secara eksplisit mengaitkan kekeliruan tersebut dengan kecenderungan mengadopsi teknologi generative AI tanpa melewati proses kurasi dan validasi manual yang memadai. Media menyoroti bahwa kemudahan yang ditawarkan teknologi AI sering kali membuat penggunaanya tergoda untuk mengabaikan tahapan verifikasi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses produksi konten. Dalam konteks BRIN, media mempertanyakan apakah keluaran AI digunakan secara langsung tanpa pemeriksaan oleh ahli atau tim verifikasi

yang kompeten. Pertanyaan ini menjadi titik masuk bagi diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana institusi pemerintah seharusnya mengadopsi teknologi baru tanpa mengorbankan standar kualitas dan akurasi yang menjadi tuntutan publik.

Framing ini tidak berhenti pada kesalahan spesifik pada gambar Garuda tetapi berkembang menjadi kritik terhadap pola kerja serba instan yang mengorbankan presisi terlebih ketika berhadapan dengan simbol-simbol kedaulatan negara yang memiliki nilai sakral dan konsekuensi hukum. Media menekankan bahwa penggunaan AI seharusnya disertai dengan kesadaran akan keterbatasan teknologi tersebut, terutama dalam hal detail yang membutuhkan ketepatan tinggi. Beberapa artikel menyoroti bahwa AI generatif cenderung menghasilkan gambar yang secara visual menarik tetapi sering kali tidak akurat secara faktual, sehingga penggunaannya untuk konten kenegaraan menuntut kehati-hatian ekstra. Media juga mengangkat pendapat para pakar teknologi yang mengingatkan bahwa AI bukanlah pengganti penilaian manusia, melainkan alat bantu yang harus tetap berada di bawah kendali dan pengawasan manusia yang kompeten di bidangnya.

Media menekankan bahwa BRIN seharusnya tidak sekadar mengandalkan keluaran AI tetapi menerapkan standar verifikasi berlapis dan keterlibatan pakar sebelum memublikasikan konten kenegaraan. Narasi ini dibangun dengan menampilkan ekspektasi publik terhadap lembaga riset yang seharusnya memahami betul seluk-beluk teknologi yang mereka gunakan. Media juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pedoman penggunaan AI bagi staf di lingkungan pemerintah, sehingga teknologi tersebut dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan reputasi institusi. Beberapa pemberitaan mengutip pernyataan pengamat yang menyarankan agar setiap konten yang dihasilkan AI melewati proses audit internal sebelum dipublikasikan, terutama jika konten tersebut berkaitan dengan simbol negara, identitas kebangsaan, atau informasi publik yang sensitif.

Dengan mengemas peristiwa ini dalam kerangka etika teknologi media mendorong audiens untuk melihatnya bukan sebagai kesalahan individu semata melainkan sebagai persoalan sistemik dalam tata kelola konten digital di lembaga publik yang menuntut perbaikan prosedur operasional standar secara menyeluruh. Media menyoroti bahwa adopsi AI di sektor pemerintahan membutuhkan kerangka etika yang jelas, mencakup transparansi penggunaan, akuntabilitas keluaran, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Framing ini juga menyentuh dimensi kebijakan publik, di mana media mendesak adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan AI di lingkungan instansi pemerintah agar tidak terjadi kesalahan

serupa di masa depan. Dengan demikian, insiden Garuda ini diposisikan sebagai momentum pembelajaran kolektif bagi seluruh ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.

Framing etika adopsi teknologi AI ini memperluas cakrawala pembaca dari peristiwa tunggal menuju refleksi yang lebih mendalam tentang hubungan antara manusia dan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Media berhasil mengangkat isu yang semula tampak sederhana menjadi diskursus tentang tanggung jawab, kompetensi, dan kebijaksanaan dalam menggunakan alat-alat teknologi canggih. Kritik yang disampaikan tidak bersifat menolak kemajuan teknologi, melainkan mengingatkan bahwa teknologi harus digunakan dengan bijak dan disertai pengawasan manusia yang memadai. Media juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan akurasi informasi yang disampaikan, sehingga setiap kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan AI berpotensi merusak hubungan antara negara dan warganya. Dengan demikian, framing ini tidak hanya menyoroti kesalahan BRIN tetapi juga mengajak publik untuk berpikir kritis tentang bagaimana teknologi seharusnya diintegrasikan dalam kehidupan bernegara.

3. Legalitas dan Sakralitas Lambang

Media menyoroti dimensi legalitas dan kesakralan Lambang Garuda Pancasila yang menjadi pijakan framing pemberitaan dengan pendekatan yang serius dan mendalam. Beberapa media mengutip secara langsung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta menyoroti potensi sanksi pidana bagi siapa pun yang menggunakan lambang negara secara tidak semestinya. Kutipan pasal-pasal tersebut tidak sekadar menjadi pelengkap pemberitaan, tetapi berfungsi sebagai landasan argumentasi bahwa kesalahan BRIN bukanlah perkara sepele yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. (Puspa Izzati Annisa, 2025) Media menegaskan bahwa lambang negara memiliki kedudukan konstitusional yang dilindungi hukum, sehingga setiap penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Framing hukum ini memberikan bobot serius pada peristiwa yang mungkin oleh sebagian pihak dianggap remeh dengan mengaitkannya pada norma konstitusional dan identitas kebangsaan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara termasuk institusi pemerintah.

Media tidak hanya memberitakan permohonan maaf BRIN tetapi juga menempatkan kekeliruan tersebut dalam kerangka pelanggaran terhadap aturan yang mengikat secara hukum. Beberapa pemberitaan mengutip pendapat ahli hukum tata negara yang menjelaskan bahwa penggunaan lambang negara secara tidak semestinya dapat berimplikasi pada sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya. Media juga

menyoroti bahwa undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara penggunaan lambang negara, sehingga kesalahan dalam penggambaran bukanlah hal yang bisa diabaikan. Dengan menghadirkan perspektif hukum, media membangun narasi bahwa insiden ini memiliki dimensi yuridis yang serius dan menuntut pertanggungjawaban yang proporsional. Framing ini juga menciptakan efek jera bagi institusi lain agar lebih berhati-hati dalam menggunakan simbol-simbol negara.

Pendekatan ini menciptakan tekanan publik yang lebih besar terhadap BRIN untuk tidak berhenti pada permintaan maaf tetapi juga melakukan evaluasi internal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Media secara berulang menegaskan bahwa permohonan maaf tanpa tindak lanjut konkret tidaklah cukup, terutama mengingat dimensi hukum yang melekat pada peristiwa tersebut. Beberapa artikel menyerukan agar BRIN melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur produksi konten, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Media juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses evaluasi internal, sehingga publik dapat menilai apakah BRIN benar-benar serius dalam memperbaiki sistemnya atau hanya sekadar memenuhi kewajiban formal. Dengan demikian, framing legalitas berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang mengingatkan institusi negara akan tanggung jawabnya dalam menjaga kehormatan simbol negara.

Media juga mengaitkan dimensi legalitas dengan aspek sakralitas lambang negara yang memiliki makna filosofis dan historis mendalam bagi bangsa Indonesia. Beberapa pemberitaan menampilkan penjelasan tentang makna setiap elemen dalam Garuda Pancasila, mulai dari jumlah bulu yang melambangkan tanggal kemerdekaan hingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keberagaman bangsa. Penjelasan ini berfungsi untuk mengingatkan publik bahwa lambang negara bukan sekadar gambar, melainkan simbol yang mengandung nilai-nilai luhur dan sejarah perjuangan bangsa. Dengan mengangkat aspek sakralitas ini, media membangun kesadaran bahwa kesalahan dalam penggambaran lambang negara bukan hanya persoalan teknis atau hukum, tetapi juga persoalan moral dan penghormatan terhadap jati diri bangsa. Framing ini menyentuh dimensi emosional pembaca yang merasa memiliki dan menghormati simbol negaranya.

Framing legalitas dan sakralitas ini menciptakan diskursus yang lebih luas tentang hubungan antara hukum, moral, dan identitas kebangsaan dalam kehidupan bernegara. Media berhasil mengangkat insiden Garuda dari peristiwa kecil menjadi refleksi tentang bagaimana institusi pemerintah seharusnya memperlakukan simbol-simbol negara dengan penuh hormat

dan tanggung jawab. Kritik yang disampaikan tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga moral, mengingatkan bahwa di balik setiap simbol negara terdapat nilai-nilai yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Media juga menekankan bahwa penghormatan terhadap lambang negara adalah cerminan dari penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, framing ini tidak hanya menyoroti kesalahan BRIN tetapi juga mengajak publik untuk merenungkan makna lebih dalam dari simbol-simbol kenegaraan yang sering kali dianggap sekadar formalitas belaka.

4. Respons Ambivalen Media Massa

Media membingkai respons BRIN secara ambivalen dengan menampilkan dua sisi yang saling bertentangan dalam satu narasi pemberitaan. Di satu sisi media mengapresiasi langkah cepat institusi tersebut dalam mengakui kesalahan, menarik konten bermasalah, dan menyampaikan permohonan maaf resmi melalui akun media sosial beserta komitmen untuk memperbaiki konten dan memperketat prosedur operasional standar ke depannya. Apresiasi ini disampaikan dengan menampilkan pernyataan resmi BRIN secara berimbang, termasuk penjelasan mengenai kronologi kesalahan dan langkah-langkah korektif yang telah diambil. Media juga menyoroti bahwa kecepatan respons BRIN patut diapresiasi karena menunjukkan itikad baik untuk segera memperbaiki kesalahan sebelum kritik publik semakin meluas. Beberapa artikel bahkan membandingkan respons BRIN dengan institusi lain yang cenderung lambat atau defensif dalam menghadapi kesalahan serupa, sehingga posisi BRIN terlihat lebih baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas. (Suprayitno et al., 2024)

Namun di sisi lain apresiasi tersebut tidak sepenuhnya menutupi kritik karena media tetap menyoroti bahwa permohonan maaf saja tidak memadai tanpa disertai perubahan struktural dalam proses produksi konten. Media secara aktif menampilkan komentar-komentar publik yang menuntut lebih dari sekadar permintaan maaf, termasuk tuntutan agar BRIN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur kerja dan meningkatkan kompetensi staf yang terlibat dalam produksi konten. Beberapa pemberitaan mengutip pendapat pengamat komunikasi yang menegaskan bahwa kredibilitas institusi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan mengakui kesalahan tetapi juga oleh keseriusan dalam mencegah terulangnya kesalahan. Media juga menyoroti bahwa komitmen perbaikan yang disampaikan BRIN perlu dibuktikan dengan tindakan nyata yang dapat diverifikasi publik, bukan sekadar pernyataan retorik yang mudah dilupakan setelah isu mereda. Dengan demikian, framing ambivalen ini menciptakan ruang dialog antara apresiasi dan tuntutan yang lebih tinggi.

Sejumlah pemberitaan menegaskan bahwa insiden ini semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi AI terutama dalam konteks simbol-simbol kenegaraan. Media memperluas cakupan pembahasan dari BRIN menuju seluruh ekosistem pemerintahan, dengan menyoroti bahwa kesalahan serupa berpotensi terjadi di lembaga lain jika tidak ada kesadaran kolektif tentang pentingnya verifikasi. Beberapa artikel mengangkat kasus-kasus serupa yang pernah terjadi di institusi lain sebagai pembanding, sehingga menciptakan narasi bahwa persoalan ini bersifat sistemik dan membutuhkan solusi yang menyeluruh. Media juga menyerukan agar pemerintah pusat mengeluarkan pedoman atau regulasi yang mengatur penggunaan AI di lingkungan instansi pemerintah, sehingga setiap lembaga memiliki acuan yang jelas dalam memproduksi konten publik. Dengan mengangkat isu ini ke tingkat kebijakan nasional, media tidak hanya menyoroti kesalahan BRIN tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara lebih luas.

Media juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses evaluasi internal yang dijanjikan BRIN. Beberapa pemberitaan menuntut agar BRIN memublikasikan hasil evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang telah diambil, sehingga publik dapat menilai keseriusan institusi tersebut. Media menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak berhenti pada permohonan maaf di media sosial, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata yang dapat diukur dan diverifikasi. Beberapa artikel mengutip pendapat ahli tata kelola pemerintahan yang menyarankan agar BRIN melibatkan pihak eksternal dalam evaluasi, sehingga hasilnya lebih objektif dan kredibel. (Indiarti et al., 2025) Dengan demikian, framing ambivalen ini tidak hanya menampilkan apresiasi dan kritik secara seimbang, tetapi juga mendorong terciptanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat dan transparan di lingkungan institusi pemerintah.

Framing terhadap respons BRIN menegaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut lebih dari sekadar permohonan maaf yakni bukti nyata adanya perbaikan sistemik yang mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. Media berhasil mengemas respons BRIN sebagai cermin dari kompleksitas hubungan antara institusi pemerintah dan publik yang semakin kritis terhadap kinerja lembaga negara. Apresiasi yang diberikan tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat pada komitmen perbaikan yang berkelanjutan. Kritik yang disampaikan juga tidak bersifat destruktif, melainkan konstruktif dengan menawarkan saran dan solusi yang konkret.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis framing terhadap pemberitaan media online mengenai kesalahan simbol Garuda Pancasila oleh BRIN pada Hari Lahir Pancasila 2026, dapat disimpulkan bahwa media tidak sekadar menyajikan fakta, tetapi secara aktif mengonstruksi realitas melalui empat pola pembingkai utama. Pertama, media membingkai insiden ini sebagai ironi kelembagaan yang tajam, menyoroti kontradiksi antara status BRIN sebagai lembaga riset dengan kegagalannya memverifikasi hal paling mendasar. Kedua, media mengemas peristiwa ini sebagai cermin persoalan etika adopsi teknologi AI di sektor pemerintahan, menekankan pentingnya kurasi dan validasi manual sebelum publikasi. Ketiga, media menonjolkan dimensi legalitas dan sakralitas lambang negara dengan mengutip Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga kesalahan tersebut tampak sebagai pelanggaran serius yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Keempat, media membingkai respons BRIN secara ambivalen, mengapresiasi langkah cepat permohonan maaf namun tetap menuntut perbaikan sistemik yang nyata. Secara keseluruhan, framing media online terhadap insiden ini mencerminkan fungsi ganda pers sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial, yang tidak hanya melaporkan peristiwa tetapi juga membentuk pemahaman publik tentang tanggung jawab institusional, etika teknologi, dan penghormatan terhadap simbol kedaulatan negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asmaul Husna, P., Setiawan, H., & Meliasanti, F. (2024). Comparative analysis of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki's framing on Covid-19 news in online media [Kumparan.Com](https://www.kumparan.com) and [Beritasatu.Com](https://www.beritasatu.com) and its recommendations as RPP for junior high school news texts. *Jurnal Disastri*, 6(3), 219–299. <https://doi.org/10.33752/disastri.v6i3.6782>
- Ayang Tarisna, & Yanti Haryanti. (2026). Analisis framing berita media [Detik.com](https://www.detik.com) dalam membentuk opini publik terhadap kasus BBM Pertamina oplosan. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 4(4), 2136–2145. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i4.10008>
- Duniya, G. G. (2025). The construction and interrogation of visual narratives through the camera in times of crisis: An introduction. In K. C. Adewumi, F. E. Olalere, & G. G. Duniya (Eds.), *Camera in times of crisis: Focus on Africa* (pp. 1–9). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83662-074-720251001>
- Fuhat, N. S. A., & Wahab, J. A. (2024). Mapping media framing and politics: A bibliometric analysis across the globe. *International Journal of Academic Research in Business and Social*

Sciences, 14(4), 1011–1032.

<https://hrmars.com/index.php/IJARBS/article/view/21273/Mapping-Media-Framing-and-Politics-A-Bibliometric-Analysis-Across-the-Globe>

- Indiarti, I., Juanda, J., & Mahmudah, M. (2025). Pemberitaan fasilitas kampus dalam media daring estetika pers: Analisis framing Robert N. Entman. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 428–441. <https://dmi-journals.org/deiktis/article/view/1277>
- Ismail, K., Sultan, M. I., Mau, M., & Junaedi, M. (2026). Analisis framing pemberitaan omnibus law pada headline tabloid PK Identitas Unhas. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 6(03), 154–165. <https://doi.org/10.69957/relasi.v6i03.3026>
- Juidah, I., & Pratiwi, V. U. (2025). CNN Indonesia's framing strategy in influencing public opinion. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2025.21607>
- Lin, Z., Zhong, Y., & Yang, L. (2024). What's in a news image? Framing people with disabilities in the changing society of China. *Disability & Society*, 39(6), 1465–1483. <https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2143325>
- Muda Siregar, A., Sazali, H., & Achiriah, A. (2023). Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam pemberitaan pemberantasan pungutan liar di Pelabuhan PT. Pelindo 1 periode 1 Juni – 30 Juni 2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(3), 973–980. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.704>
- Paramitha, G., & Karim, A. (2022). Analisis framing berita penembakan jurnalis AS di Ukraina pada [CNNIndonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) dan [Sindonews.com](https://www.sindonews.com). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(5), 376–383. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6504844>
- Prayogo, M. D., & Panuju, R. (2021). Makna radikalisme dalam lingkaran framing mediamorfosis, politis, dan ideologis. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 1(01), 17–29. <https://doi.org/10.69957/relasi.v1i01.45>
- Puspa Izzati Annisa. (2025). Analisis framing pemberitaan Afif Maulana di Instagram Narasinewsroom. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4341>
- Suprayitno, D., Ahmad, A., Tartila, T., & Aladdin, Y. A. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori komprehensif dan referensi wajib bagi peneliti*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.